

# KEPRI 2024 RUPPO

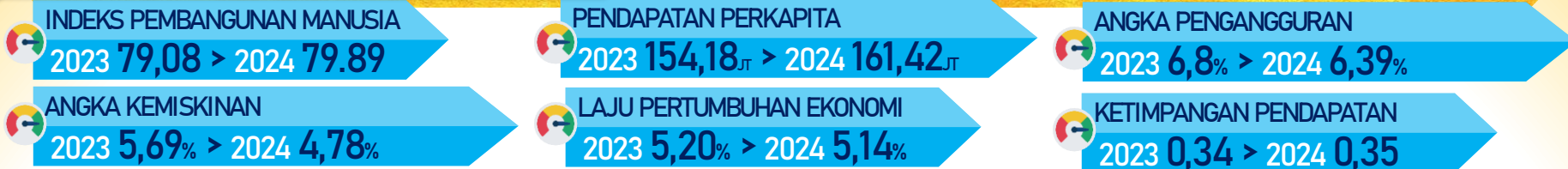


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
H. ANSAR AHMAD, S.E., MM

WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NYAYANG HARRIS PRATAMURA, S.E., M.Si

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

## POTRET KINERJA MAKRO DAERAH



## KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR (Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome))

### PENDIDIKAN

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah **90,95**

Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus **100**

### PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG

Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir **0**

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur penguatan pantai di WS Kewenangan Provinsi **0**

Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi **0**

Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota **33,51**

Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional **0**

Rasio Kemantapan Jalan **80,87**

Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli **77,25**

### KESEHATAN

Rasio daya tampung rumah sakit rujukan **1,94**

Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi **97,22**

Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana **100**

Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi **100**

### SOSIAL

Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti **100**

Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti **100**

Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti **100**

Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti **100**

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi **100**

### PERUMAHAN & PERMUKIMAN

Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni **0**

Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni **0**

Persentase Luas Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani **63,12**

Persentase Satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU **52,66**

### TRANTIBUM & LINMAS

Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan **100**

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan **50**

Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ilegal **66,66**

Persentase penanganan pra bencana **57,14**

Persentase penanganan tanggap darurat bencana **71,42**

## KEUANGAN DAERAH

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Unaudited)

Rp. 4.071.708.627.449,29



PENDAPATAN DAERAH		3.959.663.598.327,00
URAIAN	Realisasi (Milyar Rupiah)	% terhadap Pendapatan Daerah
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.981.830.000.529,00	50,05
PENDAPATAN TRANSFER	1.976.533.066.207,00	49,92
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.300.531.591,00	0,03

## EPPD & OPINI LKPD

Hasil EPPD untuk Provinsi Kepulauan Riau pada selama kurun waktu 3 tahun terakhir memiliki skor >3 dengan status prestasi "Tinggi".



## SARAN DAN MASUKAN

Dapat dikirimkan kepada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Kepulauan Riau  
 WEB: <https://kepriprov.go.id/>, <https://kepri.lapor.go.id/> atau <https://ppid.kepriprov.go.id/>  
 Email: [email@kepriprov.go.id](mailto:email@kepriprov.go.id), Telepon: 0771-123456



# RINGKASAN

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

### I. CAPAIAN KINERJA MAKRO DAERAH

Capaian kinerja makro merupakan ukuran didalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.

Adapun perkembangan capaian kinerja makro daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut in:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	79,08	79,89
2	Angka Kemiskinan	5,69	4,78
3	Angka Pengangguran	6,8	6,39
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,16	5,02
5	Pendapatan Per Kapita	154,18 Juta	161,42 Juta
6	Ketimpangan Pendapatan	0,27	0,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, Tahun 2025



a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan perkembangan positif dilihat selama 5 tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 adalah sebesar 79,08 mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 79,89 termasuk kategori tinggi.

Pencapaian pembangunan manusia ini dilakukan dengan strategi dan kebijakan pembangunan di berbagai bidang-bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

No	Dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	74,25	74,36	74,62	74,90	75,12
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,87	12,98	12,99	13,05	13,27
3.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,12	10,18	10,37	10,41	10,50
4.	Pengeluaran per Kapita (Rupiah)	14.209	14.122	14.469	14.998	15.573
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau		77,69	77,87	78,48	79,08	79,89

b. Angka Kemiskinan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau mencapai 124,96 ribu orang atau 4,78 persen, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Maret 2023 yaitu mencapai 142,5 ribu orang atau 5,69 persen. Posisi tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau lebih baik daripada kondisi kemiskinan nasional. Kondisi kemiskinan nasional terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia September 2024 mencapai 24,06 juta orang atau 8,57 persen.

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meringankan beban rumah tangga dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan serta peningkatan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan dan pendampingan bagi keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

c. Angka Pengangguran

Angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau dapat diukur menggunakan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang bersumber dari Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional yang dikelola oleh Bappenas. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau tingkat pengangguran terbuka dapat diukur dengan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang di definisikan sebagai berikut:

- Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun keatas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- Pengangguran dapat didefinisikan menjadi 3 yaitu penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena



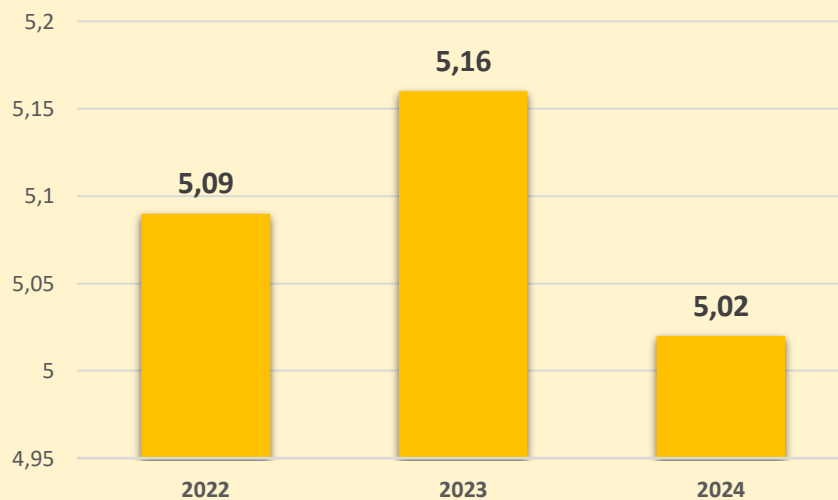
merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT disuatu daerah maka semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2024 mencapai 6,39 persen turun sebesar 0,41 persen dibandingkan Agustus 2023

d. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau digunakan data PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,02% mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 5,16%.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2022-2024



e. **Pendapatan Per Kapita**

Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan usaha di suatu daerah (region) tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam



dan faktor produksi daerah tersebut. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

### Perkembangan PDRB Per Kapita kepulauan Riau Tahun 2022-2024

Lapangan Usaha	2022	2023	2024
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	145,53	154,07	161,42
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	89,61	92,87	96,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, 2025

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.161,42 juta rupiah. Angka PDRB ADHB tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023, Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, meningkat melebihi target dari yang telah ditetapkan sebesar 87,76 Juta Rupiah pada tahun 2024 dengan capaian realisasi sebesar 96,16 Juta Rupiah sehingga capaian kinerja sebesar 109% atau dalam kategori Sangat Baik.

#### f. Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Nilai rasio gini berkisar antara 0-1 jika nilai semakin mendekati angka 1 maka mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0 maka menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada indeks gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, sedangkan indeks gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Ketimpangan pendapatan di bagi beberapa kelompok sebagai berikut:

#### Skala Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

Kriteria	Nilai
Rendah	<0,3
Sedang	>0,3-0,4
Tinggi	Diatas 0,4



Nilai indeks gini Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar 0,357, nilai indeks gini mengalami peningkatan sebesar 0,017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,340. angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori sedang.

## II. CAPAIAN KINERJA KELUARAN (OUTCOME)

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	Capaian Kinerja LPPD 2024
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
1.	Pendidikan 2 Indikator	1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	90,95
		2	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	100
2.	Kesehatan 4 Indikator	3	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,94
		4	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi	97,22
		5	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100
		6	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 Indikator	7	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0
		8	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi	0
		9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	0
		10	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	33,51
		11	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	0
		12	Rasio Kemantapan Jalan	80,87
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0
		15	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang	0



No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	Capaian Kinerja LPPD 2024
	4 Indikator		memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	
		16	Persentase Luas Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	63,12
		17	Persentase Satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	52,66
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 5 Indikator	18	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100
		19	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	50
		20	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ilegal	66,66
		21	Persentase penanganan pra bencana	57,14
		22	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	71,43
6.	Sosial 5 Indikator	23	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
		24	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
		25	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
		26	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
		27	Persentasekorban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi	100
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>				
1	Tenaga Kerja 6 Indikator	1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	57,14
		2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	4,59
		3	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	20011540,47
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	98,94
		5	Persentase Tenaga Kerja yang di tempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Provinsi	79,65
		6	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	14,45
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 Indikator	7	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13,51
		8	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	5,00
		9	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	25,05
3	Pangan 1 Indikator	10	Persentase cadangan pangan	30,72



No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	Capaian Kinerja LPPD 2024
4	Lingkungan Hidup 2 Indikator	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	75,05
		12	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi	20,58
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Indikator	13	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100
		14	Pemanfaatan data kependudukan	75
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 Indikator	15	Persentase pengentasan desa tertinggal	100
		16	Persentase peningkatan status desa mandiri	9,17
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 Indikator	17	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,15
		18	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	56,09
		19	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	0
8	Perhubungan 2 Indikator	20	Rasio konektivitas Provinsi	0,59
		21	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,22
9	Komunikasi dan Informatika 3 Indikator	22	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	83,72
		23	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	71,79
		24	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 Indikator	25	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	47,55
		26	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	3,46
11	Penanaman Modal 1 Indikator	27	Persentase peningkatan investasi di Provinsi	134,37
12	Kepemudaan dan Olahraga 3 Indikator	28	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,23
		29	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,0099237
		30	Peningkatan prestasi olahraga	27
13	Statistik 2 Indikator	31	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100



No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	Capaian Kinerja LPPD 2024
		32	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
14	Persandian 1 Indikator	33	Tingkat keamanan informasi pemerintah	64,34
15	Kebudayaan 1 Indikator	34	Terlestariannya cagar budaya	41,75
16	Perpustakaan 2 Indikator	35	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	73,69
		36	Indeks pembangunan literasi masyarakat	74,24
17	Kearsipan 2 Indikator	37	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	9,52
		38	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	22,67
<b>Urusan Pilihan</b>				
1	Kelautan dan Perikanan 2 Indikator	1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kotadi wilayah Provinsi	110,69
		2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100
2	Pariwisata 4 Indikator	3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	8,89
		4	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	52,12
		5	Tingkat Hunian akomodasi	48,13
		6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,89
3	Pertanian 2 Indikator	7	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	2334,47
		8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-33,484
4	Kehutanan 3 Indikator	9	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	100
		10	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	0,40
		11	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,91
5	Energi dan sumber daya Mineral 2 Indikator	12	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar perda	100
6	Perdagangan 7 Indikator	13	Persentase Desa yang teraliri listrik	99,76
		14	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	9,56
		15	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100



No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	Capaian Kinerja LPPD 2024
		16	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	0
		17	Tertib usaha	0
		18	Persentase kinerja realisasi pupuk	74,75
		19	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	76,56
		20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,65
7	Perindustrian 6 Indikator	21	Pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	4,89
		22	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100
		23	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0
		24	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0
		25	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0
		26	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125
<b>Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
1	Perencanaan dan Keuangan 6 Indikator	1	Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	29,01
		2	Rasio PAD	50,05
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	64,37
		4	Opini Laporan Keuangan	10
		5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3
		6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
2	Pengadaan 4 Indikator	7	Persentase Jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0
		8	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	95,40
		9	Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	29,19
		10	Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada	-25,32



No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	Capaian Kinerja LPPD 2024
			Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	
3	Kepegawaian 3 Indikator	11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	87,28
		12	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	36,88
		13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	65,84
4	Manajemen Keuangan 4 Indikator	14	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6,29
		15	Revenue mobilization: deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10,60
		16	Assets management	4
		17	Cash Management: rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,62
5	Transparansi dan Partisipasi Publik 2 Indikator	18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resource available to frontline service delivery units)	91,76
		19	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to Fiscal Information)	100

### III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk Provinsi Kepulauan Riau pada selama kurun waktu 2 tahun terakhir memiliki skor >3 dengan status prestasi "Tinggi".
- Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meraih opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2023.
- Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun anggaran 2023 didapatkan hasil opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Laporan Hasil Pemeriksaan No. 82/LHP/XVIII.TJP/04/2024 tanggal 26 April 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.
- Berbagai Upaya atau strategi yang dilakukan untuk mempertahankan opini WTP yaitu meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI), penetapan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Meningkatkan kapasitas aparatur penyusun laporan keuangan dan pengurus barang perangkat daerah melalui bimbingan teknis dan penyempurnaan

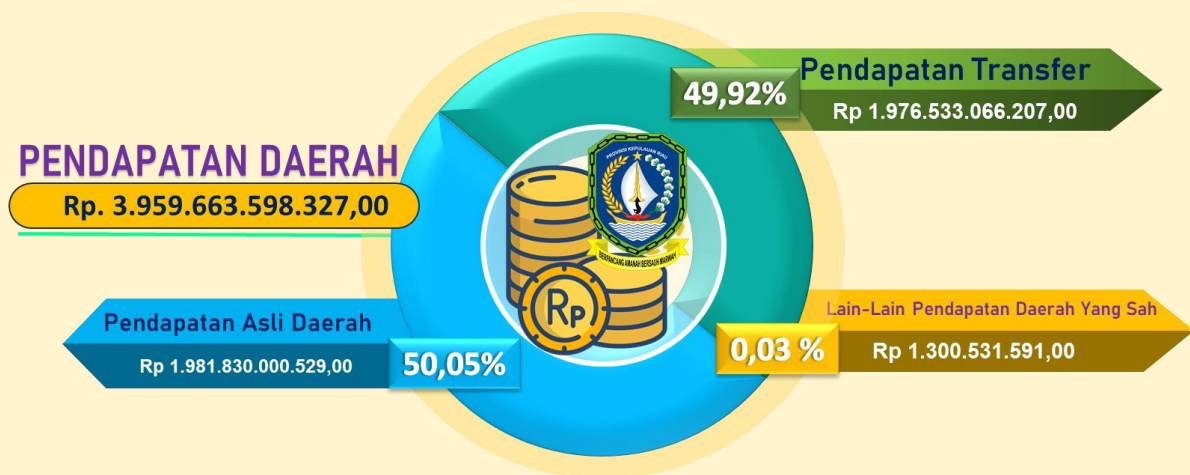


pengelolaan barang dan pengelolaan barang yaitu aplikasi SIPD. SIPD dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik terkait perencanaan pembangunan daerah sampai pelaporan keuangan daerah.

- Selama 14 Tahun berturut-turut Provinsi Kepulauan Riau mampu mempertahankan prestasi tersebut, Capaian opini WTP merupakan bukti komitmen seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan agenda reformasi birokrasi khususnya pada mewujudkan local dynamic governance.

#### IV. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah meliputi: 1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain- lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari: Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah.



Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar Rp4.071.708.627.449,29 (92,24%) dari alokasi belanja dalam APBD-P 2024 sebesar Rp4.414.198.804.785,00.



## BELANJA DAERAH

Rp. 4.071.708.627.449,29



1. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2024 sebesar Rp2.987.202.677.704,43 atau 92,69% dari anggaran dalam APBD-P 2024 sebesar Rp3.222.810.004.132,90. Realisasi Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai Rp1.309.833.869.704,00, Belanja Barang dan Jasa Rp1.311.147.692.338,16, Belanja Bunga Rp3.692.560.273,00, Belanja Subsidi Rp944.301.180,00, Belanja Hibah Rp357.581.329.209,27, dan Belanja Bantuan Sosial Rp4.002.925.000,00.
2. Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2024 sebesar Rp307.296.325.589,86 atau 89,07%, dari anggaran dalam APBD-P 2024 sebesar Rp344.997.515.174,10. Realisasi belanja modal terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp920.100.000,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp115.561.374.688,84; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp129.103.961.833,55; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp36.791.762.576,47; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.529.450.597,00; Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp5.389.675.894,00.
3. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024 sebesar Rp2.065.423.140,00 atau 43,27% dari anggaran dalam APBD-P 2024 sebesar Rp4.773.672.048,00.
4. Realisasi Belanja Transfer pada Tahun 2024 sebesar Rp775.144.201.015,00 atau sebesar 92,10% dari target anggaran dalam APBD-P tahun 2024 sebesar Rp841.617.613.430,00. Belanja transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dengan realisasi sebesar Rp748.291.201.015,00; dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp26.853.000.000,00.



KEPRI 2024  
**R L P P D**



## V. REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI BELANJA MENURUT JENIS PENGELUARAN, DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

### a. Pendapatan Daerah

Total realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 sebesar Rp3.959.663.598.327,00 atau 92,62% dari target pendapatan daerah dalam APBD-P sebesar Rp4.275.037.233.807,00.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
4	PENDAPATAN DAERAH	4.275.037.233.807,00	3.959.663.598.327,00	92,62
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.020.676.416.916,00	1.981.830.000.529,00	98,08
4.1.01	Pajak Daerah	1.738.323.174.655,00	1.777.704.385.140,00	102,27
4.1.02	Retribusi Daerah	155.935.540.754,00	148.286.242.017,30	95,09
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.003.224.423,00	1.904.909.335,00	5,60
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	92.414.477.084,00	53.934.464.036,70	58,36
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.020.676.416.916,00	1.981.830.000.529,00	98,08
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	87,84
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	87,84
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.092.700.000,00	1.300.531.591,00	31,78
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.092.700.000,00	1.300.531.591,00	31,78
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.092.700.000,00	1.300.531.591,00	31,78
	JUMLAH PENDAPATAN	4.275.037.233.807,00	3.959.663.598.327,00	92,62

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (Unaudited)

### b. Belanja Daerah



Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar Rp4.071.708.627.449,29 (92,24%) dari alokasi belanja dalam APBD-P 2024 sebesar Rp4.414.198.804.785,00. Adapun kinerja capaian realisasi belanja daerah Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
5	BELANJA DAERAH	4.414.198.804.785,00	4.071.708.627.449,29	92,24
5.1	BELANJA OPERASI	3.222.810.004.132,90	2.987.202.677.704,43	92,69
5.1.01	Belanja Pegawai	1.329.553.415.809,12	1.309.833.869.704,00	98,52
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.502.668.209.237,78	1.311.147.692.338,16	87,25
5.1.03	Belanja Bunga	4.050.000.000,00	3.692.560.273,00	91,17
5.1.04	Belanja Subsidi	1.400.000.000,00	944.301.180,00	67,45
5.1.05	Belanja Hibah	380.037.014.086,00	357.581.329.209,27	94,09
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.101.365.000,00	4.002.925.000,00	78,47
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.222.810.004.132,90	2.987.202.677.704,43	92,69
5.2	BELANJA MODAL	344.997.515.174,10	307.296.325.589,86	89,07
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.021.100.000,00	920.100.000,00	11,47
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.089.417.367,93	115.561.374.688,84	88,83
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.014.437.494,17	129.103.961.833,55	93,54
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.766.559.842,00	36.791.762.576,47	84,06
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.529.407.470,00	19.529.450.597,00	100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.576.593.000,00	5.389.675.894,00	96,65
	JUMLAH BELANJA MODAL	344.997.515.174,10	307.296.325.589,86	89,07
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.773.672.048,00	2.065.423.140,00	43,27
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.773.672.048,00	2.065.423.140,00	43,27
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	4.773.672.048,00	2.065.423.140,00	43,27
5.4	BELANJA TRANSFER	841.617.613.430,00	775.144.201.015,00	92,10
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00	92,13
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	29.445.500.000,00	26.853.000.000,00	91,20
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	841.617.613.430,00	775.144.201.015,00	92,10
	JUMLAH BELANJA	4.414.198.804.785,00	4.071.708.627.449,29	92,24
	SURPLUS/DEFISIT	(139.161.570.978,00)	(112.045.029.122,29)	80,51

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (Unaudited)

### c. Pembiayaan Daerah



Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp231.315.598.721,24 atau sebesar 100,04% dari target dalam APBD-P Tahun 2024 sebesar Rp231.214.715.013,00. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp231.315.598.721,24, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp100.883.708,00. Sementara itu pengeluaran pembiayaan di Provinsi Kepulauan Riau realisasi sebesar Rp91.945.787.633,00 atau sebesar 99,88% dari rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp92.053.144.035,00. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Pembiayaan Netto terealisasi Rp139.369.811.088,24 atau sebesar 100,15% dari rencana sebesar Rp139.161.570.978,00. Dengan demikian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun berkenaan terealisasi sebesar Rp27.324.781.965,95.

Secara rinci realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024
6	PEMBIAYAAN DAERAH	139.161.570.978,00	139.369.811.088,24	100,15
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	231.214.715.013,00	231.315.598.721,24	100,04
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	231.214.715.013,00	231.214.715.013,24	100,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	100.883.708,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	231.214.715.013,00	231.315.598.721,24	100,04
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	92.053.144.035,00	91.945.787.633,00	99,88
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	92.053.144.035,00	91.945.787.633,00	99,88
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	92.053.144.035,00	91.945.787.633,00	99,88
	PEMBIAYAAN NETTO	139.161.570.978,00	139.369.811.088,24	100,15
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	27.324.781.965,95	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (Unaudited)

## VI. INOVASI DAERAH



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2024 berada pada peringkat 25 dari 34 Provinsi dengan Skor Indeks sebesar 50,33 memiliki predikat “Inovatif” bersama dengan 21 provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya telah Menyusun Pengembangan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau serta telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Inovasi Daerah pada tahun 2024 yang melengkapi Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

